		NOMOR SOP	OT.02.02/1/2521/2022			
		TGL. PEMBUATAN	4 Oktober 2022			
	Kamankaa	TGL. REVISI / REVISI KE-	23 September 2025 / 3			
	Kemenkes BKK Palembang	TGL. EFEKTIF	23 September 2025			
	DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	DISAHKAN OLEH	EMMILYA ROSA, SKM., MKM.			
		NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK			
	AR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mampu mengoperasikan komputer dan Microsoft Office Memiliki kemampuan mengolah data sederhana				
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memiliki kemampuan mengolah data si	edernana			
3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan					
4.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan					
5.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan					
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN				
1.	SOP Pengelolaan Publikasi Media Sosial dan Website BKK Kelas I Palembang	Komputer / Laptop / Handphone Jaringan komputer dan Internet Rilis Kegiatan				
PERI	NGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
1.	Apabila SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan, maka hak pelanggan/masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik tidak terpenuhi	Laporan dan rekapitulasi Daftar Informa pemohon	asi Publik yang diminta per periode dari			
2.	Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberi GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apa pun	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip Palembang	aktif di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas			
3.	Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima	Merupakan turunan pengelolaan komur penyelenggaraan administrasi, manajeme				
5227	전 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					

4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

		Pelaksana				Mutu Baku				
No	Kegiatan	Petugas Pengelola Informasi	Pejabat PPID	Kepala Balai	Petugas Pengelola Dokumentasi	Péjabat PPID Kemenkes / Ditjen P2P	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)	<u> </u>					Surat / email / formulir, Komputer, Internet	10 Menit	Catatan / Formulir Permintaan IP	
2	Melaporkan kepada penanggung jawab						Catatan / Formulir Permintaan IP	10 Menit	Lembar Disposisi	
3	Menginstruksikan untuk persiapan segala sesuatu yang terkalt permintaan IP						Lembar Disposisi	15 Menit	DIP yang dibutuhkan pemohon	
4	Menginformasikan ke petugas untuk memproses lebih lanjut	—					DIP yang dibutuhkan pemohon	30 Menit	DIP yang dibutuhkan pemohon	
5	Mengecek status informasi yang diminta apakah termasuk dikecualikan atau tidak. Apabila permintaan IP termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan maka petugas Pengelola Informasi BKK Kelas I Palembang akan berkoordinasi dengan Pejabat PPID Kernenkes/Ditjen P2P	ya tidak				*	DIP yang dibutuhkan pemohon	60 Menit	DIP yang dibutuhkan pemohon	
	Menyiapkan dan menyusun jawaban permintaan IP	-					DIP yang dibutuhkan pemohon	60 Menit	DIP yang dibutuhkan pemohon	
7	Menghubungi pemohon IP						DIP yang dibutuhkan pemohon	60 Menit	Laporan DIP	
8	Melaporkan kepada pimpinan		-				Laporan DIP	15 Menit	Laporan DiP	•
	Membuat monev dan dokumentasi permintaan informasi publik (IP)						Rekapitulasi pemohonan IP	5 menit	Rekapitulasi pemohonan IP	